

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Amir, Ari Yusuf, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Yogyakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: Edisi Revisi IV*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiman, Maman, 2020, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Bemmelen, J.M. Van, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.
- H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Hatarik, Hamzah, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kristian, 2018, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Reksodiputro, Marjono, 1994, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reza, Aulia Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta.
- S.R, Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soejono, H. Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Tim POKJA Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Pidana Korporasi*, MA dan KPK, Jakarta.

## INTERNET

Fana Suparman, “Kasus Saham Garuda, Nazaruddin Ditinggal Sejumlah Pengacara”, Berita Satu  
<https://www.beritasatu.com/nasional/324871/kasus-saham-garuda-nazaruddin-ditinggal-sejumlah-pengacara> diakses pada 8 Maret 2022.

Feri Agus Setyawan, “Jerat Korupsi Korporasi PT. DGI dan Speak Terjang Nazaruddin”, CNN Indonesia  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170724090630-12-229854/jerat-korupsi-kooporasi-pt-dgi-dan-sepak-terjang-nazaruddin> diakses pada 8 Maret 2022.

ICJR, “Ini Catatan ICJR Terkait Perma Penanganan Tindak Pidana Korporasi”,  
<https://icjr.or.id/ini-catatan-icjr-terkait-perma-penanganan-tindak-pidana-korporasi/> diakses pada 18 September 2021.

Muhammad Idris, “Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negera Rp. 23,7 Triliun”, <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/030400326/ini-kronologi-korupsi-asabri-yang-merugikan-negara-rp-23-7-triliun?page=all> diakses pada 13 Januari 2022.

## JURNAL-JURNAL

Bahari Sanjaya., *et al.*, “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.

Budi Suhariyanto, “Urgensi Pemidanaan Terhadap Pengendali Korporasi yang Tidak Tercantum dalam Kepengurusan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No.3, Desember 2017.

Budianto Eldist, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3, Juli-Agustus 2018.

Haniah, “Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No.2, Desember 2018.

- Lois Sintung, “Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.1, Januari-Maret 2015.
- Michella Kristina, “Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016”, *Jurnal Yustika*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018.
- Nur Aripkah, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, Mei 2020.
- Pascal David Wungkana, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari PERMA Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 2, April 2018.
- Sarief Hidayat, “Pemidanaan Korporasi Terkait Transfer Pricing di Bidang Perpajakan”. *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019.
- Stephanie Earl, *Ascerraining the Criminal Liability of a Corporation, New Zeland Business Law Quarterly*, 2007.
- Sulistiowati, “Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Perusahaan Grup”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, No. 3, 2012.
- Warih Anjari, “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, November 2016.

## **KARYA ILMIAH**

- Alfarizy, Tomy 2022, “Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengisi Kekosongan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korporasi”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Hamdani, Muhammad Iqbal, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Induk Perusahaan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Karami, Adiya Rizki, 2018, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korporasi, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pradana, Herdika Andre, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Merek, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sahuri L., 2003, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Sulistiowati, 1997, Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak dalam Perusahaan Kelompok, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2019